Jelang Pilpres, KPK Jamin Tetap Independen

[JAKARTA] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin independensinya sebagai lembaga penegak hukum khususnya, dalam pemberantasan korupsi tidak terganggu akan agenda politik menjelang pelaksanaan Pilpres pada 9 Juli 2014. Badan antikorupsi itu yakin tidak terinfiltrasi kepentingan politik terkait persaingan pada pilpres.

"Insya Allah KPK mampu menjaga independensinya yang wajib dijunjung tinggi dan diawasi oleh masyarakat luas," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, di Jakarta, Rabu (30/4).

Dirinya berharap, lembaga penegak hukum lainnya juga dapat menjaga institusinya dari oknum-oknum yang memanfaatkan hukum untuk menyandera lawan politik.

"Diharapkan aparat penegak hukum lain menjaga juga martabat kelembagaannya. Pengalaman pahit dan tidak jujur pada era orde baru harus sudah dibuang ke laut," katanya.

Bicara penegakan hukum di Indonesia tidak ada habis-habisnya. Dari perkara kecil hingga perkara besar selalu saja ada bagian menarik untuk diwacanakan. Apalagi menjelang Pilpres 9 Juli 2014. Lembaga penegak hukum bisa terseret dalam pusaran persaingan perebutan kekuasaan.

Pakar hukum Indriyanto Seno Adji mengatakan, syarat mutlak aparat penegak hukum yang mesti dijaga adalah integritas kelembagaan yang terbebas dari kepentingan politik. Lembaga penegak hukum secara umum termasuk Kepolisian, dan Kejaksaan, harus mampu menjaga dirinya agar tidak tergiring opini yang sengaja dibentuk sebagai bagian dari kampanye hitam.



DOK SP

Busyro Muqoddas

"Lembaga penegak hukum memang harus lepas dari intervensi dan kepentingan pihak eksternal, dan salah satu hal terpenting yang harus dilakukan adalah penegak hukum memiliki integritas kelembagaan non-partisan. Kampanye hitam tentang capres pelanggar HAM atau capres penjual aset negara, harus dihindari oleh penegak hukum," kata Indriyanto.

Menurutnya, Kepolisian, dan Kejaksaan belum terbebas dari kekuatan politik yang sewaktu-waktu bisa dijadikan alat untuk saling sandera. Artinya, independensi kedua lembaga penegak hukum itu masih sebatas retorika mengingat, secara struktural keduanya bagian dari eksekutif. Dengan begitu, sistem ketatanegaraan seharusnya dapat menjamin penegakan hukum yang profesional.

"Kecuali KPK yang dijamin independensinya sesuai undang-undang (UU). Jadi sistem birokrasi ketatanegaraan inilah sebagai salah satu faktor yang menyebabkan adanya intervensi kekuasaan sehingga membawa dampak pada diragukannya kapabilitas, independensi penegak hukum," jelasnya.

Program Hukum

Praktisi hukum Frans Hendra Winarta mengatakan, kekhawatiran akan hukum selalu dijadikan komoditas politik tetap bertahan selama negara memberi ruang.

Maka, sudah sepatutnya sosok-sosok yang dipastikan atau digadang-gadang bakal maju dalam Pilpres 2014 membeberkan program-program perbaikan hukumnya dari sekarang.

"Harus punya program penegakan hukum agar cita-cita negara hukum tercapai tanpa itu jangan dipilih. Bukan saatnya lagi jual-beli jabatan menteri. Memojokkan lawan politik dengan hukum berarti memperalat hukum sebagai alat politik. Ini harus dihindarkan kalau mau konsisten," katanya.

Pilpres 2014, ujarnya, sangat menentukan kondisi penegakan hukum ke depan. Jabatan Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri harus diduduki oleh sosok-sosok yang benar-benar mumpuni. Jika tidak, stigma yang sekarang ini masih melekat di benak masyarakat akan tetap bertahan. Untuk mengatasinya maka, para calon pemimpin bangsa harus mampu menjadikan hukum sebagai panglima.

"Campur aduknya hukum dan politik selama ini melemahkan penegakan hukum dan hukum tidak pernah jadi panglima, dikalahkan kepentingan politik. Supremasi hukum sering didengungkan tetapi miskin diterapkan.

Jaksa Agung, Menkumham, Kapolri, untuk bidang hukum mutlak haris profesional dan bukan politisi, sudah saatnya Indonesia menjadikan hukum sebagai panglima," ujarnya.

[E-11]